

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Irfani Firli¹, Dian Efriyenti²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email : pb170810151@upbatam.ac.id

ABSTRACT

There are still many taxpayers who do not understand using the e-filing system and knowledge of taxation resulting in compliance in carrying out their obligations is still not optimal. Therefore, the Directorate General of Taxation continues to modernize the system and media to gain tax knowledge. This study aims to determine whether the Modernization of Tax Administration and Knowledge Systems has an effect on Taxpayer Compliance. The population of this research is WPOP registered at KPP Pratama Batam Selatan, amounting to 346,894. The sampling technique used a random sampling technique with the slovin formula, so that the sample amounted to 100 respondents. Data analysis techniques used descriptive analysis, instrument testing, classical assumptions, multiple linear analysis, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Modernization of the Tax Administration System has a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of $0.015 < 0.05$. Tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$. Modernization of Tax Administration and Knowledge Systems simultaneously affects the compliance of taxpayers registered at KPP Pratama South Batam.

Keywords : *Tax Administration System Modernization; Taxpayer Compliance; Tax Knowledge.*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah tanah yang punya kekayaan sumber daya alam dan manusia yang banyak. Di Indonesia, Pembangunan sangat penting bagi kesejahteraan rakyatnya. Agar suatu negara dapat berkembang, diperlukan sumber daya yang sangat besar. Salah satu sumber pendanaan pembangunan terbesar di Indonesia adalah sektor perpajakan. Perpajakan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dan bersama sebagai Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan guna mengongkosi seluruh kebutuhan pemerintah dan pembangunan nasional.

Hukum perpajakan Indonesia saat ini memiliki sistem poin tersendiri untuk

pemungutan pajak. Sistem pemungutan ini berarti bahwa wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dan wajib pajak patut melaporkan berturut-turut banyaknya pajak yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Pravitasari, Hidayati, & Wahyuni, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak bisa dibuktikan dengan membayar Wajib Pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jika aturan wajib pajak tidak diikuti, hal itu akan mengurangi kontribusi tunai kepada negara untuk dana pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya kepatuhan pajak (Pravitasari et al., 2017).

Dibawah ini ialah data kepatuhan WP dari tahun 2016 sampai 2020 :

Table 1 Kepatuhan WP Direktorat Jenderal Pajak

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	WPOP Wajib Laporan	SPT Yang Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	86%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

(Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2021)

Berdasarkan data diatas, terlihat tahun 2016 WPOP terdaftar 257.789, SPT terlapor 58.374, SPT tidak terlapor 6.918 dan tingkat kepatuhan 89%. Tahun 2017, WPOP terdaftar 257.789, SPT terlapor 49.849, SPT tidak terlapor 7.294 dan tingkat kepatuhan 87%. Tahun 2018, WPOP terdaftar 283.327, SPT terlapor 44.981, SPT tidak terlapor 5.099 dan tingkat kepatuhan 89%. Tahun 2019, WPOP terdaftar 295.043, SPT terlapor 48.451, SPT tidak terlapor 6.162 dan tingkat kepatuhan 86%. Tahun 2020, WPOP terdaftar 346.894, SPT terlapor 47.242, SPT tidak terlapor 6.960 dan tingkat kepatuhan 87%. Berdasarkan informasi pada table, hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal dan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem perpajakannya yaitu dengan memberikan pelayanan yang lebih sederhana, ramah dan tidak berbelit-belit serta memperbaharui sistem modern sehingga wajib pajak dapat mengakses secara *online* yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak perlu datang lagi ke KPP untuk melaksanakan kewajiban pajaknya namun bagi wajib pajak yang tidak memahami sistem ini pastinya berasumsi bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan itu hal yang sangat rumit akibatnya banyak Wajib Pajak gagal menunaikan kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua ialah pengetahuan wajib pajak. Meskipun disediakan fasilitas seperti Kelas Pajak serta layanan media sosial seperti Instagram, WhatsApp serta Youtube oleh KPP yang dapat memudahkan wajib pajak, namun Wajib Pajak tidak memanfaatkannya dengan baik untuk memperdalam

pengetahuannya, karena banyak wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan bukanlah suatu perkara penting untuk dilaksanakan. Akibatnya, WP tidak menunaikan kewajibannya. Berikut penelitian yang menunjang penelitian ini ialah dilaksanakan (Yunita Sari & Jati, 2019) yang menunjukkan Sistem administrasi modern, Pengetahuan dan Kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif pada kepatuhan WPOP. Berdasar yang sudah dijelaskan, rumusan masalah ialah :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
 2. Apakah pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
 3. Apakah modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
- Berdasar rumusan yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini ialah :
1. Guna melihat modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
 2. Guna melihat pengetahuan perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
 3. Guna melihat modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan ada pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasar paparan itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN"

KAJIAN TEORI

2.1 Pajak

Secara umum, pajak adalah jumlah yang wajib dipungut oleh pemerintahan dari warganya guna mengongkosi belanja pemerintah sehari-hari dan ongkos membangun tanpa imbalan dan dapat disalurkan secara berlanjut (Prasetyono, 2012 : 11). Pajak yang dikenakan pada dasarnya sama. Ini berarti bahwa rakyat akan diminta untuk mentransfer sebagian aset mereka sebagai kontribusi untuk pembiayaan barang dan jasa untuk kepentingan umum (Priantara, 2012 : 2).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam KBBI, ketaatan artinya mentaati atau menaati suatu ketentuan. Kepatuhan perpajakan merupakan Wajib Pajak yaitu dapat menghitung sendiri pajaknya, membayar lalu mengembalikannya tepat pada waktunya sesuai dengan peraturannya dan wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku (Anam, Andini, & Hartono, 2016).

2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Di Indonesia tahun 1983, sistem klasifikasi pajak telah diperbarui atau diubah dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System* guna mengurangi khawatir WP akan praktik tidak sah karena ada komunikasi langsung antara WP dan otoritas pajak. Dimulai dari tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak sudah meresmikan rancangan untuk mereformasi ataupun mengubah administrasi perpajakan yang dapat dikatakan sebagai modernisasi (Kusuma, Mahaputra, & Sudiartana, 2020). Modernisasi ialah salah satu jenis terobosan atau inovasi yang memudahkan WP dalam melakukan kewajibannya (Putra, 2017).

2.4 Pengetahuan Perpajakan

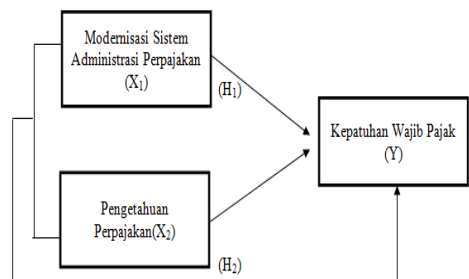
Pengetahuan dan pemahaman tentang pengembalian pajak sangat penting untuk mempelajari perpajakan dan menerapkan pengetahuan ini ke aplikasi pajak. Pengertian undang-undang perpajakan merupakan cara bagi wajib pajak guna mengerti dan mengatur UU perpajakan, peraturan dan prosedur tindakan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan banyak lagi. Ketika wajib pajak tahu pajak, kepatuhan pajak juga akan meningkat (Efriyenty, 2017).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan (Pravitasari et al., 2017) punya judul Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Kesadaran WP pada Kepatuhan WP di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang menunjukkan semua variable ada pengaruh signifikan pada Kepatuhan WP.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber : Data Penelitian, 2021)

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ialah dibawah inii :

- H₁ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₂ : Pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₃ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Pengetahuan

perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah kuantitatif. Tahapan dilaksanakan ialah merumuskan masalah, mengumpulkan tinjauan pustaka, merumuskan hipotesis, mengumpulkan kuesioner, menganalisis data dan terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran. Data yang dipakai ialah primer yang bersumber dari tanggapan responden lewat angket *Google Form* via *online*. Populasi yaitu WPOP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan berjumlah 346.894, teknik penentuan sample yaitu Random sampling dan rumus slovin dan taraf kesalahan 0,1 sehingga memperoleh sampel sejumlah 100 WPOP dan kebanyakan wanita berkerja di Kota Batam yang menjadi sampel penelitian ini. Variable dependent ialah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable independent ialah Modernisasi Sistem

Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan.

Data diolah menggunakan SPSS ver 25. Teknik analisi data yang dipakai ialah uji instrumen yang dibagi menjadi validitas dan reliabilitas. Lalu deskriptif dan asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas). Selanjutnya dilakukan regresi linier berganda dan diakhiri dengan hipotesis ((T), (F) dan Analisis determinasi). Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan, Jl. Jenderall Sudiirman, ATB Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indahh, Sukajadii, Kota Batam, Kepri 29444.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Data dilihat dari nilai range, min, max, mean dan standar deviasi dan disajikan dibawah ini :

Table 2. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
Modernisasi Sistem Administrasi Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	12	25	20,55	3,195	10,210
Valid N (listwise)	100						

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Data memperlihatkan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai nilai *min* 12 dan *max* 25 sehingga nilai *range* yang diperoleh adalah 13. Rata-rata (*Mean*) yang di dapatkan adalah 20,55 dengan standart deviasi (*standart deviation*) sebesar 3,195 dan *Variance* sebesar 10,210. Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai *minimum* 17 dan *maksimum* 30 sehingga nilai *Range* yang diperoleh adalah 13.

Rata-rata (*Mean*) yang di dapatkan adalah 24,60 dengan standart deviasi (*standart deviation*) sebesar 3,235 dan *Variance* sebesar 10,465. Serta, Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai *min* 25 dan *max* 45 sehingga nilai *Range* yang diperoleh adalah 20. Rata-rata (*Mean*) yang di dapatkan adalah 36,28 dengan standart deviasi (*standart deviation*) sebesar 5,373 dan *Variance* sebesar 28,870.

4.2 Uji Validitas

Table 3. Hasil Validitas

No	Variable	Pernyataan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
1	Modernisasi Sistem Administrasi	X1.1	0,779	0,1966	Valid
		X1.2	0,768		Valid
		X1.3	0,747		Valid
		X1.4	0,784		Valid
		X1.5	0,733		Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,607	0,1966	Valid
		X2.2	0,652		Valid
		X2.3	0,737		Valid
		X2.4	0,657		Valid
		X2.5	0,734		Valid
		X2.6	0,661		Valid
3	Kepatuhan WP	Y1	0,592	0,1966	Valid
		Y2	0,615		Valid
		Y3	0,707		Valid
		Y4	0,723		Valid
		Y5	0,635		Valid
		Y6	0,779		Valid
		Y7	0,741		Valid
		Y8	0,626		Valid
		Y9	0,702		Valid

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Table 3 memperlihatkan hasil validitas untuk semua pernyataan mempunyai $R_{hitung} > R_{tabel}$, maka bisa

ditarik kesimpulan semua pernyataan dianggap valid.

4.3 Uji Reliabilitas

Table 4. Hasil Reliabilitas

No	Variable	Cronbach Alpha	Item	Keterangan
1	Modernisasi Sistem Administrasi	0,819	5	Reliable
2	Pengetahuan Perpajakan	0,764	6	Reliable
3	Kepatuhan WP	0,855	9	Reliable

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Bersumber pada data tersebut bisa ditarik kesimpulan item-item pernyataan pada setiap variable independent dan

variable dependent dianggap reliable yang diperlihatkan dari *Cronbach's Alpha* > 0,60.

4.4 Uji Normalitas

Table 5. Hasil Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,84293951
Most Extrem Diferences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,065
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,136 ^c

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Hasil bisa terlihat berdasarkan *Kolmogorov Smirnov*, dimana diperlihatkan nilai signifikan (*Asym. Sig. 2-tailed*) yaitu 0,136 yang dimana nilai

tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikansinya 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan data penelitian sudah terdistribusi normal.

4.5 Uji Multikolinearitas

Table 6. Hasil Multikolinearitas
Coefficiensa

Model	Collinearity Statistics	
1 (Constant)	Tolerance	VIF
Modernisasi sistem administrasi	.412	2.430
Pengetahuan Perpajakan	.421	2.430

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Data memperlihatkan nilai VIF modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 2,430 < 10 dan tolerance 0,412 > 0,1, mengartikan data tersebut tidak mengalami

Multikolinieritas dan begitu juga nilai VIF pengetahuan perpajakan adalah 2,430 < 10 dan tolerance 0,421 > 0,1, maka data tersebut tidak mengalami multikolinieritas.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Table 7. Hasil Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1 (Constsnt)		1.443	1.976		.730	.467
Modernisasi Sistem Administrasi Pengetahuan Perpajakan		-.105	.125	-.132	-.840	.403
		.146	.123	.186	1.181	.240

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Data memperlihatkan signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebesar 0,403, nilai

signifikan pengetahuan perpajakan yaitu 0,240. Karena nilai signifikan > 0,05, bisa

ditarik kesimpulan tidak ada heteroskedastisitas untuk setiap variabel.

4.7 Uji Regresi Linier Berganda

Table 8. Hasil Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandarized Coeficients		Standarized Coeficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.783	3.015		2.582	.011
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.471	.190	.280	2.475	.015
	Pengetahuan Perpajakan	.765	.188	.460	4.067	.000

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Pada table 8 didapati persamaan dibawahh ini :

$$Y = 7.783 + 0,471 + 0,765 + e$$

Penjelasan dari persamaan diatas yakni :

1. Nilai konstanta yaitu 7.783, bila Modernisasi Sistem Administrasi (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2), memiliki nilai sejumlah 0,471 dan 0,765 maka Kepatuhan WP (Y) mempunyai nilai sejumlah 7.783.
2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 0.471, mengartikan bila variable independen lainnya tetap dan Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan (X1) akan naik satu satuan dan juga akan menaikkan Kepatuhan WP (Y) sebesar 0,471 atau 47,1 % sehingga terjadinya hubungan positif antara dua variable tersebut.

3. Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai koefisien regresi 0,765, mengartikan Pengetahuan Perpajakan (X2) akan naik satu satuan dan juga akan menaikkan Kepatuhan WP (Y) sebesar 0,765 atau 76,5 % sehingga terjadinya hubungan positif antara dua variable tersebut.

4.8 Uji Parsial (T)

Table 9. Hasil uji (T)

		Coefficients^a				
		Unstandarized Coeficients		Standarized Coeficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.783	3.015		2.582	.011
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.471	.190	.280	2.475	.015
	Pengetahuan Perpajakan	.765	.188	.460	4.067	.000

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Uji ini dilaksanakan dengan menghitung derajat kebebasan (n-k-1), di mana $100 - 2 - 1 = 97$, didalam Ttable

ialah 1,66071. Maka dari hasilnya disimpulkan bahwa :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai t hitung

2.475 > 1,66071, kemudian nilai signifikan 0,015 tidak melebihi 0,05 yang diartikan secara parsial Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian hipotesis pertama di terima.

2. Pengetahuan pajak memiliki nilai t hitung 4,067 > 1,66071 dengan nilai signifikan 0,000 tidak melebihi 0,05 yang diartikan secara parsial Pengetahuan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian hipotesis kedua di terima.

4.9 Uji Simultan (F)

Table 10. Hasil Uji (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1396,110	2	698,055	46,313	,000 ^b
	Residual	1462,050	97	15,073		
	Total	2858,160	99			

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Uji ini dilaksanakan dengan menghitung nilai F hitung yakni $df_1 = k - 1$, sehingga $df_1 = 3 - 1 = 2$. Kemudian $df_2 = n - k - 1$, sehingga $100 - 2 - 1 = 97$, maka F table nya yakni 3,09. Terlihat ditabel 4.10 nilai F hitung 46.313 dan sudah melebihi 3,09 dan punya nilai

signifiikan $0,000 > 0,05$. Maka simpulannya ialah secara simultan modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

4.10 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Table 11. Hasil Uji Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Estimate	
1	,699 ^a	,488	,478	3,882	

(Sumber : SPSS Versi 25, 2021)

Terlihat ditabel 11 bahwa *R square* ialah 0,488, yang artinya persentase pengaruh variable modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan

perpajakan sebesar 48,8%, kemudian sisanya 51,2% dipengaruhi oleh variable lain.

4.11 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan WP

Berdasarkan objek diteliti, Modernisasi Sistem Administrasi di KPP Partama Batam Selatan telah menggunakan sistem pelaporan berbasis online, dimana pelaporan pajaknya sudah menggunakan sistem e-filling sehingga memudahkan WP dalam mematuhi kewajibannya karena sistem e-filling bisa di akses oleh WP di mana saja dan akan meningkatkan kepatuhan WP. Hasil selaras dengan penelitian terdahulu yang megemukakan Sistem

Administrasi Perpajakan Modern ada pengaruh positif pada kepatuhan WP (Yunita Sari & Jati, 2019).

4.12 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan WP

Berdasarkan objek diteliti, Pengetahuan di KPP Pratama Batam Selatan telah meningkat. Hal ini di sebabkan karena sudah banyak media WP untuk tahu makin banyak tentang pajak seperti yang telah dilakukan oleh KPP yaitu dengan memberikan kelas pajak atau sosialisasi sehingga WP lebih

banyak belajar dan akan memotivasi dan mendorong WP mematuhi kewajibannya. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya, mengemukakan pengetahuan perpajakan ada pengaruh positif pada kepatuhan WPOP (Kusuma et al., 2020).

4.13 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Berdasarkan objek diteliti, Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan di KPP Pratama Batam Selatan telah menggunakan sistem e-filing dan semakin mendalamnya pengetahuan WP terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dan mengakibatkan WP lebih taat pada kewajibannya. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu, mengemukakan Modernisasi Sistem Administrasi dan

Pengetahuan Perpajakan ada pengaruh signifikan pada Kepatuhan WP (Pravitasari et al., 2017).

SIMPULAN

Simpulan dipaparkan seperti dibawah ini :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Pengetahuan Perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI DI KPP PRATAMA SALATIGA) MOHAMMAD.*
- Efriyenty, D. (2017). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA KOTA BATAM.* 2(November).
- Kusuma, I. N., Mahaputra, A., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan , Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WPOP.* 2(3), 286–303.
- Prasetyono, S. D. (2012). *BUKU PINTAR PAJAK* (K. Nana, ed.). Jogjakarta: Laksana.
- Pravitasari, N., Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG.* *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 548–561.
- Priantara, D. (2012). *PERPAJAKAN INDONESIA PEMBAHASAN LENGKAP & TERKINI DISERTAI CD PRATIKUM.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, A. F. (2017). *PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK.* *JURNAL AKUNTANSI INDONESIA*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). *PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WPOP.* *E-Jurnal Akuntansi*, 26(16), 310.

<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>